



Rangkap Keanggotaan Jadi Temuan BPK

TABANAN, TRIBUN BALI

- Rencana hibah bantuan sosial (Bansos) tahun ini terdendat karena kekhawatiran Pemkab Tabanan akan rangkap keanggotaan penerima bantuan. Sebab hal ini pernah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun lalu.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi I DPRD Tabanan dengan Pemkab Tabanan di ruang rapat DPRD Tabanan Selasa (5/9). Anggota dewan yang hadir dalam sidang tersebut hanya tiga orang, yakni Ketua Komisi I DPRD Tabanan, Putu Eka Putra, I Gusti Omar Dhani, dan Wayan Widnyana. Sedangkan dari eksekutif dipimpin Asisten III Setda Tabanan, Made Sukada.

Asisten II Setda Tabanan, Wayan Miarsana mempersoalkan rangkap keanggotaan lembaga penerima hibah yang sempat menjadi temuan BPK. Ia mencontohkan, *klian adat* yang menjadi anggota kelompok ternak, di sisi lain juga pengurus *pura dadia*.

Dua lembaga yang diikuti *klian adat* ini mendapat bantuan dana hibah bersamaan dari kabupaten dan provinsi. "BPK menjadikan itu temuan dan catatan jangan sampai terulang lagi," katanya.

Eka Nucahyadi mengatakan, eksekusi anggaran APBD Perubahan 2017 cukup mepet. Meski sudah diketuk palu, yang menjadi masalah uangnya ternyata belum ada. Pihaknya meminta eksekutif memberikan

perhatian agar dana hibah bisa cair tepat waktu. Mengacu pada aturan, mestinya hal itu tidak menjadi persoalan. Apalagi, lembaganya berbeda. Ia meminta dari inspektorat untuk mencari kesepahaman. "Karena kami juga tidak berani memberikan jaminan," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut belum ada solusi soal rangkap keanggotaan penerima hibah. Ia menyebut, tidak sedikit warga yang rangkap anggota dalam penerimaan hibah. Hal itu karena seseorang biasanya menjadi pengurus banjar, juga pengurus kelompok sektor ekonomi (ternak, tani), maupun pura, sanggar, hingga *sekaa*. "Ini harus dicarikan solusi secepatnya," kata dia. (arg)

Edisi : Rabu 6 September 2017

Hal : 4